**Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah**

Oleh: Siti Kasiyati S.Ag., M.Ag, Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., SH., MH, Tri Yogi Prastiyo, SH, Muhamad Taufik Kustiawan, SH, Nur Sholikin, SH.

Email: mhhpwajateng@gmail.com

**ABSTRACT**

The poor society generally find it difficult to access justice, even though it is a constitutional right of citizens.Therefore, to get justice (access to justice) the poor society must get free legal assistance.This matter has been regulated in Law Number 16 of 2011 concerning legal aid and Perma No 2014.The Law Council and Human Rights Regional Leadership 'Aisyiyah Central Java is one of the accredited legal aid organizations in 2013 which was founded in 2002 which provides legal aid services to poor society.The legal aid budget provided by the government through the State Budget for OBH accreditation C is only for about 10-16 cases per year. Meanwhile, through Legal Aid Post, there are around 200 people every year.On the other hand, the number of bankum recipients continues to increase every year.

The purpose of this research is to see the implementation of legal aid in the Law and Human Rights Council for Regional Leaders of 'Aisyiyah, Central Java and The number of cases and types of cases including the Law and Human Rights Council for Regional Leaders' AisyiyahJawa from 2018-2020.This research is a qualitative descriptive field research.The objects of research are litigation and non-litigation cases as well as data on Legal Aid Post services in the Religious Courts where the Legal and Human Rights Council for Regional Leadership 'Aisyiyah, Central Java in 2018 to 2020 partners including the Sukoharjo, Boyolali, Klaten and Sragen and Purbalingga Religious Courts.Sources of data obtained from interviews, observation and documentation.

The results showed that the concept of services carried out by the Law and Human Rights Council of the Regional Leadership of 'Aisyiyah Central Java to the poor in Posbakum Sukoharjo, Boyolali, Wonogiri, Purbalingga, Klaten and Sragen Religious Courts are in accordance with Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid . The types of cases handled by the Law and Human Rights Council for Regional Leadership 'Aisyiyah, Central Java are quite complex, including litigation and non-litigation cases. The total number of litigation case services in 2018 reached 55 cases, in 2019 it reached 40 cases, January to March 2020 reached 22 cases, as for non-litigation cases at the Boyolali Religious Court post in 2018 the total number was 99 cases, Sukoharjo Religious Court in 2018 a total of 105 cases, the Wonogiri Religious Court in 2019 a total of 151 cases, the Sukoharjo Religious Court in 2019 a total of 254 cases, the Purbalingga Religious Court from January to March 2019 a total of 345 cases, the Boyolali Religious Court as of March 2020 the total number of 218 103 cases, the Klaten Religious Court as of March 2020 a total of 179 cases, the Sukoharjo Religious Court as of March 2020 there were 184 cases. The obstacles that are often experienced by the litigation companion team include the process of proving a case in court, both letter and witness evidence. Meanwhile, barriers in the non-litigation field in the Religious Courts Posbakum include client psychology which is sometimes difficult to communicate with, obstacles to internal Court policies such as service hours which must be adjusted to working hours and Posbakum services provided exceed the target limit set by the Supreme Court and sometimes there are differences between judge / clerk if the Posbakum officer has difficulties in drafting a lawsuit / application.

Keywords: *Legal Aid Post (Legal Aid Post ), Poor society,MHH 'Aisyiyah Central Java.*

**Pendahuluan**

Legalitas bantuan hukum sudah ditetapkan dalam regulasi, salah satunya berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma (gratis) kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang yang sudah diatur di atas.[[1]](#footnote-2) Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Penyelenggaraan Bantuan[[2]](#footnote-3) Hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkara ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi, semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak Pengadilan Agama. Padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum. Persamaan di hadapan hukum harus disertai pula dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*), salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan adalah pemberian bantuan hukum kepada fakir miskin, di mana tidak hanya orang mampu yang dapat memperoleh pembelaan dari advokad atau pembela umum tetapi juga fakir miskin dalam rangka memperoleh keadilan (*access to justice*). Untuk menjamin akses pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (gratis) bagi masyarakat miskin telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Dalam undang-undang tersebut salah satu syarat dalam pemberian bantuan hukum diantanaya dilakukan oleh lembaga bantuan hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah merupakan lembaga bantuan Hukum yang terakreditasi sejak tahun 2013 sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 kemudian diperbarui dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018. Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah dibentuk pada tahun 2002 ketika Muktamar periode 2002-2005 berdasarkan SK No. 49/PWA/A-SK/XII/2002. Hal yang melandasi berdirinya lembaga ini adalah untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran universal dan membela hak-hak kaum tertindas sebagai manivestasi dari gerakan persyarikatan Muhammadiyah yakni *amar ma’ruf nahi munkar.* Di samping itu dakwah tersebut merupakan amanat dari Muktamar Muhammadiyah.

Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah sudah bekerjasama dengan berbagai lembaga baik pemerintah maupun swasta diantaranya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, PPT Provinsi Jawa Tengah, Pusat Pelayanan Terpadu perempuan dan Anak Kota Surakarta dalam penanganan perkara baik litigasi maupun non litigasi. Selain itu pada tahun 2018-2020 Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah juga bekerja sama dengan Pengadilan Agama Sukoharjo, Boyolali, Wonogiri, Klaten, Sragen, dan Purbalingga untuk menangani berbagai perkara baik secara litigasi maupun non litigasi (di Posbakum) seperti pembuatan dokumen hukum yang meliputi perbuatan gugatan cerai, permohonan talak, dispensasi nikah, itsbat nikah, penetapan waris, pendampingan hukum, pemberdayaan masyarakat dan penyuluhan hukum. Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah juga melakukan pendampingan secara serius terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan difabel.

Penelitian ini difokuskan pada implementasi bantuan hukum di posbakum pengadilan agama tahun 2018-2020, dimana pada tahun tersebut Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah telah melakukan pendampingan dan pelayanan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi di pengadilan agama Sukoharjo, Boyolali, Wonogiri, Klaten, Sragen, Purbalingga.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang dilakukan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Aisyiyah Jawa Tengah?
2. Jenis perkara apa saja yang ditangani Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Aisyiyah Jawa Tengah?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi di dalam memberikan pelayanan bantuan hukum dimasyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berbentuk *survey*. Di mana semua populasi digunakan sebagai informan. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan partisipasif, yaitu melibatkan informan secara aktif dalam wawancara sehingga terjadi komunikasi yang baik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun objek penelitian adalah perkara litigasi dan non litigasi di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Aisyiyah Jawa Tengah dan data layanan Posbakum serta jenis perkara yang ditangani Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Aisyiyah Jawa Tengah di Pengadilan Agama mitra yakni pengadilan agama Sukoharjo, Boyolali, Wonogiri, Klaten, Sragen, dan Purbalingga pada tahun 2018 sampai 2020. Penelitian juga menggunakan analisa data dalam bentuk induktif dan bersifat kualitatif. Salah satu ciri terpenting penelitan non doktrinal *(socio legal research)* ialah pada titik tekannya pada kenyataan empiris sehingga proses berpikirnya bersifat induktif, yaitu proses berpikir yang memusatkan perhatiannya pada hal-hal yang bersifat khusus berupa kenyataan empiris, kemudian beralih pada hal-hal yang bersifat umum berupa rangkaian konsep atau teori, dan kemudian diakhiri dengan pengambilan kesimpulan. Sedangkan analisis kualitatif lebih menekankan pada kualitas dibandingkan dengan kuantitas data, sehingga yang muncul adalah kata-kata bukan deretan angka-angka. Dalam analisa kualitatif umumnya data diuraikan dalam bentuk narasi yang disusun secara sistematis, logis dan merupakan hasil dari proses interpretasi peneliti terhadap data yang dihasilkan.

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

1. **Implementasi Bantuan Hukum di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah**

Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah merupakan lembaga bantuan Hukum yang terakreditasi sejak tahun 2013 sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 kemudian diperbarui dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018. Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah dibentuk pada tahun 2002 ketika Muktamar periode 2002-2005 berdasarkan SK No. 49/PWA/A-SK/XII/2002. Hal yang melandasi berdirinya lembaga ini adalah untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran universal dan membela hak-hak kaum tertindas sebagai manivestasi dari gerakan persyarikatan Muhammadiyah yakni *amar ma’ruf nahi munkar.* Di samping itu dakwah tersebut merupakan amanat dari Muktamar Muhammadiyah. Mandat yang harus dijalankan oleh lembaga ini adalah mendorong penegakan hukum dan HAM berdasarkan kebenaran dan tidak bertentangan dengan AD/ART Muhammadiyah dan Aisyiyah menuju masyarakat adil dan sejahtera.Hal-hal yang dilakukan lembaga tersebut adalah: **b**erkenaan dengan isu hukum dan demokrasi, memperjuangkan kebenaran universal, dan lebih difokuskan tentang perempuan dan anak. Pelayanan ditujukan untuk umum baik untuk warga Muhammadiyah maupun lainnya dan berdiri di atas semua golongan.

Berdasarkan penjelasan di atas isu strategis yang diangkat lembaga ini adalah penegakan hukum, HAM dan advokasi terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian pada periode Muktamar 2005-2010 Lembaga ini berubah nama menjadi LHOHA (Lembaga Hubungan Organisasi Hak dan Advokasi) berdasarkan SK meski demikian di Jawa Tengah tetap menggunakan LEHHAMAS, di Jawa Tengah telah Ada 16 Kab/Kota. Lembaga Hubungan Organisasi Hukum dan Advokasi Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah berkantor pusat di Semarang namun dalam hal pelayanan lembaga tersebut berada di kota Surakarta. Hal ini mengingat ketersediaan SDM dan domisili ketua lembaga berada di Kabupaten Sukoharjo- Surakarta. Sebagai lembaga layanan yang berada di bawah ormas keagamaan keberadaannya sangatlah dibutuhkan bagi organisasi maupun masyarakat, meski dengan sumber pendanaan yang terbatas, eksistensi lembaga terus dilakukan dari tahun 2002 sampai dengan sekarang, meskipun periode kepengurusan telah berganti pada tahun 2005.

Periode Muktamar 2010-2015 mengingat pentingnya kehadiran Lembaga ini maka nama lembaga berubah menjadi Majelis Hukum dan HAM PWA ‘Aisyiyah Jawa Tengah yang berarti secara Hukum di setiap pimpinan Daerah ‘Aisyiyah sejawa Tengah otomatis berdiri Majelis Hukum dan HAM minimal sampai dengan Cabang, tingkat Kecamatan, bahkan bisa sampai Ranting (Desa). Alhamdulillah sejak tahun 2010 sudah berdiri Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah di 35 Kab/kota di Jawa Tengah. Bahkan sesuai dengan hasil Rakernas tahun 2013, Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah menggariskan bahwa di tingkat kabupaten kota diharapkan berdiri Pos Bantuan Hukum yang namanya disesuaikan dengan kondisi lokal daerah tersebut.

Pada tahun 2010, sesuai dengan Muktamar, lembaga ini merumuskan program dalam musyawarah wilayah dan dijabarkan dalam rapat kerja pimpinan wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah memiliki lima divisi yakni: Divisi Litigasi, Div. Non Litigasi, Div. Kajian, Divisi Diklat dan Divisi Hubungan Organisasi. Majelis ini terus berupaya meski dengan segala keterbatasan yang ada, dapat melakukan berbagai kegiatan diantaranya melakukan bantuan hukum kepada masyarakat miskin khususnya kekerasan berbasis gender dan anak, advokasi kebijakan, kajian, sosialisasi dengan berbagai media baik di internal Aisyiyah maupun eksternal, Melakukan diklat paralegal dengan *korp mubalighot* pimpinan wilayah ‘Aisyiyah, rehabilitasi korban, pemulihan secara psikis dan mental spiritual.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 yang dimaksud dengan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok masyarakat miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Kementerian Hukum dan HAM RI. Hal senada juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013. Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan untuk mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.[[3]](#footnote-4)

Ruang lingkup Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Pasal 4: (1) Bantuan Hukum diberikan kepada penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima Bantuan Hukum. Pasal 5 (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, atau perumahan.

Dalam pasal 27 PERMA No. 1 Tahun 2014, disebutkan bahwa lembaga yang bekerjasama dengan pengadilan untuk menjadi pemberi layanan posbakum harus memenuhi kriteria diantaranya berbentuk badan hukum (diprioritaskan lembaga hukum yang terakreditasi), berdomisili diwilayah hukum pengadilan, memiliki pengalaman dalam menangani perkaradan/atau beracara di pengadilan, memiliki minimal 1 orang advokat, memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di posbakum pengadilan yang bergelar minimal sarjana hukum atau sarjana syariah.[[4]](#footnote-5)

Dalam konteks tersebut Majelis Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah merupakan lembaga bantuan hukum yang terakreditasi dan telah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat baik secara litigasi maupun non litigasi.

**1. Bantuan Hukum Litigasi**

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 dalam Pasal 1 menjelaskan yang dimaksud dengan Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. Standar Bantuan Hukum diantaranya meliputi: standar Bantuan Hukum litigasi, standar Bantuan Hukum Nonlitigasi, standar pelaksana Bantuan Hukum, standar pemberian Bantuan Hukum dan standar pelaporan pengelolaan anggaran. Di sini akan dijelaskan mengenai standar pelaksanaan Bantuan Hukum dalam perkara Litigasi maupun Non litigasi.[[5]](#footnote-6)

Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.[[6]](#footnote-7) Sedangkan Non litigasi merupakan proses penanganan perkara di luar Pengadilan Agama, yang meliputi konsultasi, negosiasi, investigasi, drafting hukum, penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat dan lain-lain. Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan dengan cara :[[7]](#footnote-8)1). Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan.2). Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan dipersidangan.3). Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.[[8]](#footnote-9) Dalam Pasal 4 Kemenkumham Nomor 22 Tahun 2013, pemberian Bantuan Hukum litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2015 tentang syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum adalah sebagai berikut: *Pertama,* pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang terdaftar pada pemberi Bantuan Hukum. *Kedua,* pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum di luar pelaksana Bantuan Hukum yang telah terdaftar jika : a). Ketersediaan jumlah pelaksana bantuan hukum tidak mencukupi dalam menangani perkara. b). Tidak terdapat pemberi Bantuan Hukum di wilayah tempat tinggal penerima Bantuan Hukum. *Ketiga,* direktur atau Ketua pemberi Bantuan Hukum yang merekrut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menetapkan keputusan terhadap advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang telah direkrut sebagai pelaksana Bantuan Hukum. *Keempat,* pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendaftarkan pelaksana Bantuan Hukum kepada unit kerja yang tugas dan fungsinya.

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013, dilakukan dengan cara:[[9]](#footnote-10) *Pertama,* pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan. *Kedua,* pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; *Ketiga,* pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Konsep pelayanan hukum secara litigasi pada dasarnya sesuai dengan peraturan yang terkandung dalam UU No. 16 Tahun 2011 dan UU No. 42 Tahun 2013 memuat konsep pelayanan Bantuan Hukum secara litigasi. Hal ini dimuat dalam pasal 14 UU No. 16 Tahun 2011 menjelaskan mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. Dalam UU No. 42 Tahun 2013 juga menjelaskan demikian dalam pasal 6. UU Bantuan Hukum ini memperjelas bahwa pemohon dalam memohon Bantuan Hukum harus melengkapi syarat-syarat yang telah diatur.[[10]](#footnote-11)

Pada prakteknya, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah turut melihat keberadaan kondisi pemohon sebelum menangani perkara pelayanan secara litigasi. Hal ini meminimalisir terjadinya kebohongan yang sering marak terjadi, sehingga dengan cara silaturahmi tersebut dari tim Lembaga Bantuan Hukum dapat memastikan kelayakan dalam memberikan pelayanan litigasi kepada pemohon. Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah juga memiliki fokus penanganan perkara korban kekerasan terhadap perempuan dan difabel. Namun, dari 2018 sampai 2020 tercatat bahwa penanganan kasus secara litigasi cukup stabil dari setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa pelayanan secara litigasi yang ditangani Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah cukup beragam. Selain itu, wilayah pelayanan litigasi juga tidak hanya fokus dalam satu Kabupaten, namun lingkup sekarisidenan Surakarta.

Adapun data perkara litigasi yang ditangani Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah pada tahun 2018 berjumlah 60 perkara dengan rincian perkara perdata berjumlah 55 perkara dan Pidana 5 perkara. Pada tahun 2019 perkara jumlah total perkara 48 perkara dengan rincian perkara perdata berjumlah 43 perkara dan pidana 5 perkara. Pada tahun 2020 jumlah total perkara 66 perkara dengan rincian perkara perdata berjumlah 57 perkara dan pidana 9 perkara.

Dari data-data penelitian di atas, menunjukan bahwa konsep pelayanan Bantuan Hukum secara litigasi sudah cukup maksimal. Keberhasilan menyelesaikan berbagai perkara litigasi tersebut dapat dilacak dari prestasi laporan dari beberapa instansi lembaga hukum seperti Kemenkuham dan Biro Hukum Jawa Tengah. Sehingga hal ini menunjukan bahwa Majelis Hukum dam HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah telah menjalankan program Bantuan Hukum dengan kinerja maksimal. Namun, selama bertugas sebagai pelayan masyarakat, terdapat hambatan-hambatan terhadap berbagai kasus yang ditangani posbakum di antaranya: *Pertama*, perceraian biasanya mengalami kekerasan berupa penelantaran, kasus yang paling banyak ditangani Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah adalah anak korban penelantaran, bahkan kalau dilihat dari Pengadilan Agama setiap tahunnya meningkat. Namun, anak korban perceraian belum mendapatkan perhatian yang cukup baik dari pemerintah maupun masyarakat. Dampak dari perceraian sangatlah luas, di antaranya anak tersebut bisa terlantar, menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, anak mengalami trauma dan tidak percaya diri.[[11]](#footnote-12)

Problem tersebut haruslah ada trobosan hukum untuk perlindungan bagi anak korban perceraian. Seharusnya hakim *ex officio* bisa memutuskan tentang nafkah anak setelah orang tuanya bercerai, dan mengamanatkan kepada institusi negara untuk melakukan pengawasan, misalnya dilekatkan di kantor urusan agama dan dinas kependudukan dan catatan sipil dan atau lembaga lainnya yang diamanati oleh Undang-undang sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam. Dengan meningkatnya jumlah kasus kekerasan tersebut belum didukung anggaran bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah melalui kementrian hukum dan HAM belum bisa menjangkau seluruh masyarakat miskin dan itu pun sasarannya kebanyakan untuk tindak pidana sedangkan dana untuk korban sangat minin. Dalam hal pemulihan korban kekerasan, baik untuk perempuan, anak dan difabel belum ada anggaran dari pemerintah dan tidak ada ganti rugi yang mereka terima.

Keadaan tersebut membuat kami untuk peduli sehingga diperlukan kerjasama dari berbagai pihak agar tunas bangsa ini kelak kemudian hari dapat menjadi generasi Rabbani dan melanjutkan cita-cita perjuangan kita. Sebagai tindak lanjut dari permasalahan masalah di atas maka Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah bermaksud mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak, sebagai upaya pencegahan dan penanganan serta pemulihan, dengan mengadakan Posbakum Aisyiyah dan Rumah Sakinah sebagai sarana pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan dan rehabilitasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak-hak mereka agar dapat hidup layak dikemudian hari.

Adapun hambatan-hambatan lain yang dialami oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah antara lain proses pembuktian. Dalam perkara dipersidangan terkendala menjadi kendala dalam penanganan perkara litigasi. Baik bukti surat maupun saksi. Terlebih apabila klein kesulitan dalam mencari Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Terkadang team Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah harus turun langsung ke lapangan (kelurahan) untuk membantu mencari syarat tersebut. Kemudian saski yang diajak oleh klein terkadang tidak sesuai dengan harapan (tidak mengetahui secara detail terkait duduk perkara). Penyiapan berkas-berkas sidang yang kurang lengkap, terkadang buku nikah hilang, nama tidak sesuai antara berkas satu dengan yang lain yang menyebabkan hambatan dalam menyelesaikan perkara.

Selain itu, jika klein yang terburu-buru juga menjadi kendala dalam penanganan. Karena dalam proses penyiapan berkas persidangan tidak semudah yang dibayangkan oleh klein. Terkadang persiapan memang harus matang. Selain itu, hal-hal yang menjadi sulit dan hambatan adalah klein yang sulit dinasehati, terutama terkait persidangan. Seperti lupa, sikap *ngeyel* dan lain-lain. Adapun kendala atau hambatan secara non litigasi di Pengadilan Agama sebagai berikut. Psikologi klein merupakan kendala yang dirasa sulit untuk ditemukan solusinya, karena memang kami belum memiliki petugas khusus yang menguasai dalam bidang psikologi. Dalam hal psikologi terkadang klein susah untuk diajak komunikasi. Sehingga menghambat petugas dalam menemukan fakta-fakta hukum yang dihadapi oleh klein. Tidak jarang pula klein bersikap tergesa-gesa dan terbawa emosi yang diluapkan kepada petugas Posbakum.

**2. Bantuan Hukum Non Litigasi**

Bantuan Hukum secara Non-litigasi atau pendampingan Non-litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan. Bantuan hukum ini dapat dilakukan dengan cara: *Pertama,* pemberian Bantuan Hukum secara Non litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi. *Kedua,* pemberian Bantuan Hukum secara Non litigasi meliputi kegiatan: 1). Penyuluhan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan dalam usaha untuk mengendalikan dan mengontrol tingkah laku masyarakat agar tetap berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. 2). Konsultasi hukum merupakan orang yang bertindak memberikan nasehat-nasehat dan pendapat hukum terhadap suatu tindakan/ perbuatan hukum yang akan dan yang telah dilakukan oleh kliennya. 3). Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik. 4). Mediasi merupakan penyelesaian melalui musyawarah yang di tengahi oleh seorang atau lebih mediator netral. 5). Negosiasi merupakan para penyelesaian sengketa di mana antara dua orang atau lebih/para pihak yang mempunyai hal atau bersengketa saling melakukan kompromi atau tawar-menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk kesepakatan.

Adapun data penelitian dari tahun 2018 sampai 2020 bahwa perkara non litigasi di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah diantaranya meliputi perkara di posbakum Pengadilan Agama yang meliputi Pengadilan Agama Boyolali tahun 2018 jumlah total 99 perkara, dengan rincian: cerai gugat 41 Perkara, cerai talak 30 perkara, harta bersama 1 perkara, perwalian 1 perkara, itsbat nikah 1 perkara, dispensasi nikah 3 perkara, perubahan nama 15 perkara, kewarisan 1 perkara, hak asuh anak 5 perkara, lain-lain 1 perkara. Pengadilan Agama Sukoharjo tahun 2018 jumlah total 105 perkara dengan rincian: cerai gugat 12 Perkara, cerai talak 7 perkara, wali adhal 1 perkara, perubahan nama 1 perkara, verzet 1 perkara, hak asuh anak 5 perkara, lain-lain 78 perkara. Pengadilan Agama Wonogiri tahun 2019 jumlah total 151 perkara :dengan rincian cerai gugat 19 Perkara, cerai talak 20 perkara, dispensasi nikah 4 perkara, perubahan nama 11 perkara, kewarisan 4 perkara, hak asuh anak 1 perkara, asal-usul anak 1 perkara lain-lain 90 perkara.

Pengadilan Agama Sukoharjo tahun 2019 jumlah total 254 perkara dengan rincian gugat cerai 37 perkara, perubahan nama 16 perkara, penetapan ahli waris 2 perkara, lain-lain 1 perkara, cerai talak 27 perkara, pengangkatan anak 1 perkara, perwalian 1 perkara, itsbat nikah 1 perkara, dispensasi nikah 10 perkara, perubahan nama 7 perkara, kewarisan 7 perkara, penetapan ahli waris 1 perkara, lain-lain 154 perkara. Pengadilan Agama Purbalingga dari bulan januari–maret tahun 2019 jumlah total 345 perkara meliputi: cerai gugat 229 Perkara, cerai talak 77 perkara, izin poligami 0 perkara, penolakan 0 perkara, harta bersama 1 perkara, pengesahan anak 3 perkara, pengangkatan anak 1 perkara, perwalian 1 perkara, itsbat nikah 4 perkara, dispensasi nikah 13 perkara, wali adhal 4 perkara, perubahan nama 8 perkara, kewarisan 1 perkara, hibah 0 perkara, penetapan ahli waris 1 perkara, lain-lain 2 perkara. Pengadilan Agama Boyolali per-Maret 2020 jumlah total 218 perkara dengan rincian cerai gugat 103 Perkara, cerai talak 39 perkara, izin poligami 1 perkara, pengangkatan anak 1 perkara, dispensasi nikah 55 perkara, perubahan nama 16 perkara, penetapan ahli waris 2 perkara, lain-lain 1 perkara. Pengadilan Agama Klaten per-Maret 2020 jumlah total 179 perkara dengan rincian cerai gugat 108 Perkara, cerai talak 25 perkara, pengangkatan anak 2 perkara, perwalian 3 perkara, itsbat nikah 1 perkara, dispensasi nikah 20 perkara, wali adhal 1 perkara, kewarisan 1 perkara, penetapan ahli waris 3 perkara, lain-lain 15 perkara. Pengadilan Agama Sukoharjo per-Maret 2020 jumlah total 184 perkara dengan rincian cerai gugat 40 Perkara, cerai talak 56 perkara, pengangkatan anak 4 perkara, perwalian 3 perkara, itsbat nikah 1 perkara, dispensasi nikah 27 perkara, perubahan nama 7 perkara, penetapan wali 2 perkara, penetapan ahli waris 6 perkara, lain-lain 38 perkara serta Pengadilan Agama Sukoharjo per-Maret 2020 jumlah total perkara jumlah total 90 perkara dengan rincian cerai gugat 47 Perkara, cerai talak 17 perkara, perwalian 1 perkara, itsbat nikah 1 perkara, dispensasi nikah 12 perkara, wali adhal 1 perkara, performa 2 perkara, lain-lain 9 perkara.

Adapun data penelitian dari tahun 2018 sampai 2020 di Pengadilan Agama Boyolali, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Sragen, dan Purbalinga kasus-kasus yang ditangani Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah cukup beragam. Diantaranya; cerai gugat, cerai talak, permohonan pengangkatan anak, dispensasi nikah, konsultasi hukum, dan lain-lain. Jumlah tersebut termuat dalam tabel sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Posbakum** | **Jumlah Pencapaian Penanganan Perkara** |
| 2018 | PA. Boyolali | 99 |
| PA. Sukoharjo | 101 |
|  | |
| 2019 | PA. Wonogiri | 150 |
| PA. Purbalingga | 1.644 |
| PA. Sukoharjo | 254 |
|  | |
| 2020 | PA. Sragen | 453 |
| PA. Sukoharjo | 731 |
| PA. Klaten | 452 |
| PA. Boyolali | 555 |
| PA. Purbalingga | 790 |

**Diagram Penanganan Pekara tahun 2018**

Pada tahun 2018, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah bekerjasama dengan Pengadilan Agama Boyolali dan Pengadilan Agama Sukoharjo. Data dari diagram di atas menunjukan bahwa penanganan di Posbakum sudah cukup tinggi. Dan kasus yang didampingi Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah didominasi perceraian dan kekerasan anak dan perempuan.

**Diagram Penanganan Perkara tahun 2019**

Pada tahun 2019, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah bekerjasama dengan 3 Pengadilan Agama yaitu Wonogiri, Sukoharjo, Purbalingga. Adapun konsultasi dan drafting hukum pada tahun 2019 mencapai 150 perkara Pengadilan Agama Wonogiri, Pengadilan Agama Purbalinga 1.644 perkara, dan Pengadilan Agama Sukoharjo mencapai 254 perkara.

**Diagram Penanganan Perkara 2020 (belum final)**

Pada tahun 2020, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah bekerjasama dengan 4 lembaga Pengadilan Agama. Tentu, hal ini merupakan capaian yang cukup baik karena mendapat amanah untuk memberikan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi. Pada tahun 2020, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah mendampingi dengan jumlah perkara dengan jumlah total di Pengadilan Sragen 453, Pengadilan Sukoharjo 731 perkara, Pengadilan Agama Klaten 555, dan Pengadilan Agama Purbalingga 790 perkara. Sehingga Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Jawa Tengah sudah menjadi Lembaga Bantuan Hukum yang memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan terhadap warga kurang mampu.

Adapun hambatan yang sering dirasakan oleh petugas posbakum diantaranya adalah Hambatan secara kebijakan internal Pengadilan Agama, seperti jam pelayanan yang harus disesuaikan dengan jam kerja pegawai Pengadilan. Padahal Posbakum merupakan bagian eksternal Pengadilan dengan anggaran yang terbatas sehingga dirasa tidak sesuai apabila diterapkan sistem kerja yang disamakan dengan pegawai Pengadilan Agama. Kemudian kebijakan Pengadilan untuk membebankan semua layanan drafting hukum di Posbakum, sehingga pelayanan yang kita berikan melebihi batas target yang ditentutakan oleh Mahkamah Agung. Hal tersebut sehingga mengganggu tingkat kecermatan petugas dalam memberikan pelayanan, yang berimbas dalam pembuatan dokumen hukum (pembuatan gugatan maupun permohonan) tidak maksimal karena sudah terlalu *overload.* Selain itu, terdapat perbedaan pendapat di lingkungan hakim apabila petugas Posbakum terdapat kesulitan kemudian konsultasi dengan hakim dan panitera. Akhirnya beberapa kasus terdapat miskomunikasi yang kemudian mengakibat petugas Posbakum bimbang dalam mempertimbangkan masukan/saran yang diberikan oleh hakim maupun panitera Pengadilan Agama.

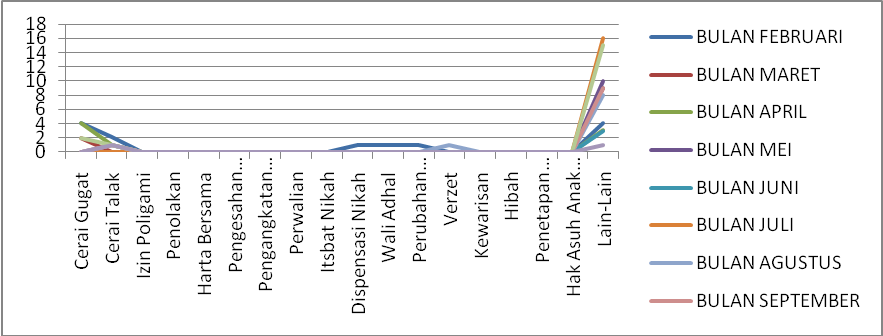
**b.** **Jenis Perkara yang ditangani Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Aisyiyah Jawa Tengah**

Jenis perkara yang ditangani Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Aisyiyah Jawa Tengah meliputi cerai gugat, cerai talak, izin poligami, pengangkatan anak, dispensasi nikah, perubahan nama, penetapan ahli waris dan lain-lain. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. **Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2018**

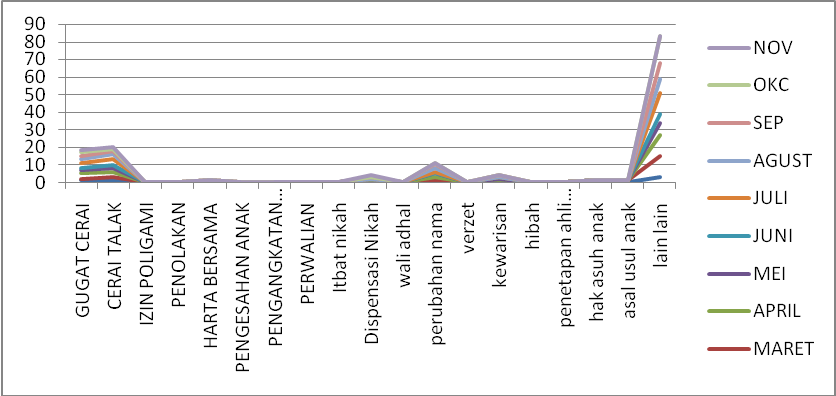
Bahwa jumlah perkara yang ditangani oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah di Pengadilan Agama Boyolali tahun 2018 meliputi: cerai gugat 41 Perkara, cerai talak 30 perkara, izin poligami 0 perkara, penolakan 0 perkara, harta bersama 1 perkara, pengesahan anak 0 perkara, pengangkatan anak 0 perkara, perwalian 1 perkara, itsbat nikah 1 perkara, dispensasi nikah 3 perkara, wali adhal 0 perkara, perubahan nama 15 perkara, verzet 0 perkara, kewarisan 1 perkara, hibah 0 perkara, penetapan ahli waris 0 perkara, hak asuh anak 5 perkara, lain-lain 1 perkara.[[12]](#footnote-13)

1. **Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2018**



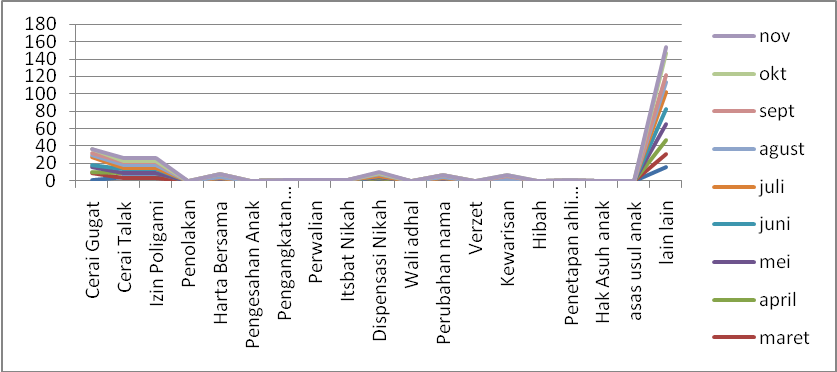
Bahwa jumlah perkara yang ditangani oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah di Pengadilan Agama Sukoharjo tahun 2018 meliputi: cerai gugat 12 Perkara, cerai talak 7 perkara, izin poligami 0 perkara, penolakan 0 perkara, harta bersama 0 perkara, pengesahan anak 0 perkara, pengangkatan anak 0 perkara, perwalian 0 perkara, itsbat nikah 0 perkara, dispensasi nikah 1 perkara, wali adhal 1 perkara, perubahan nama 1 perkara, verzet 1 perkara, kewarisan 0 perkara, hibah 0 perkara, penetapan ahli waris 0 perkara, hak asuh anak 5 perkara, lain-lain 78 perkara.[[13]](#footnote-14)

1. **Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2019**



Bahwa jumlah perkara yang ditangani oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah di Pengadilan Agama Wonogiri tahun 2019 meliputi: cerai gugat 19 Perkara, cerai talak 20 perkara, izin poligami 0 perkara, penolakan 0 perkara, harta bersama 1 perkara, pengesahan anak 0 perkara, pengangkatan anak 0 perkara, perwalian 0 perkara, itsbat nikah 0 perkara, dispensasi nikah 4 perkara, wali adhal 0 perkara, perubahan nama 11 perkara, verzet 0 perkara, kewarisan 4 perkara, hibah 0 perkara, penetapan ahli waris 0 perkara, hak asuh anak 1 perkara, asal usul anak 1 perkara, lain-lain 90 perkara.[[14]](#footnote-15)

1. **Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2019**



Bahwa jumlah perkara yang ditangani oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah di Pengadilan Agama Sukoharjo tahun 2019 meliputi: cerai gugat 37 Perkara, cerai talak 27 perkara, izin poligami 0 perkara, penolakan 0 perkara, harta bersama 8 perkara, pengesahan anak 0 perkara, pengangkatan anak 1 perkara, perwalian 1 perkara, itsbat nikah 1 perkara, dispensasi nikah 10 perkara, wali adhal 0 perkara, perubahan nama 7 perkara, verzet 0 perkara, kewarisan 7 perkara, hibah 0 perkara, penetapan ahli waris 1 perkara, hak asuh anak 0 perkara, lain-lain 154 perkara.[[15]](#footnote-16)

1. **Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2019**

Bahwa jumlah perkara yang ditangani oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah di Pengadilan Agama Purbalingga dari bulan januari – maret tahun 2019 meliputi: cerai gugat 229 Perkara, cerai talak 77 perkara, izin poligami 0 perkara, penolakan 0 perkara, harta bersama 1 perkara, pengesahan anak 3 perkara, pengangkatan anak 1 perkara, perwalian 1 perkara, itsbat nikah 4 perkara, dispensasi nikah 13 perkara, wali adhal 4 perkara, perubahan nama 8 perkara, kewarisan 1 perkara, hibah 0 perkara, penetapan ahli waris 1 perkara, , lain-lain 2 perkara.[[16]](#footnote-17)

1. **Pengadilan Agama Boyolali per-Maret 2020**

Bahwa jumlah perkara yang ditangani oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah di Pengadilan Agama Boyolali per-Maret 2020 meliputi: cerai gugat 103 Perkara, cerai talak 39 perkara, izin poligami 1 perkara, pengangkatan anak 1 perkara, dispensasi nikah 55 perkara, perubahan nama 16 perkara, penetapan ahli waris 2 perkara, lain-lain 1 perkara.[[17]](#footnote-18)

1. **Pengadilan Agama Klaten per-Maret Tahun 2020**

Bahwa jumlah perkara yang ditangani oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah di Pengadilan Agama Klaten per-Maret 2020 meliputi: cerai gugat 108 Perkara, cerai talak 25 perkara, pengangkatan anak 2 perkara, perwalian 3 perkara, itsbat nikah 1 perkara, dispensasi nikah 20 perkara, wali adhal 1 perkara, kewarisan 1 perkara, penetapan ahli waris 3 perkara, lain-lain 15 perkara.[[18]](#footnote-19)

1. **Pengadilan Agama Sukoharjo per-Maret Tahun 2020**

Bahwa jumlah perkara yang ditangani oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah di Pengadilan Agama Sukoharjo per-Maret 2020 meliputi: cerai gugat 140 Perkara, cerai talak 56 perkara, pengangkatan anak 4 perkara, perwalian 3 perkara, itsbat nikah 1 perkara, dispensasi nikah 27 perkara, perubahan nama 7 perkara, penetapan wali 2 perkara, penetapan ahli waris 6 perkara, lain-lain 38 perkara.[[19]](#footnote-20)

1. **Pengadilan Agama Sragen per-Maret Tahun 2020**

Bahwa jumlah perkara yang ditangani oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah di Pengadilan Agama Sragen per-Maret 2020 meliputi: cerai gugat 47 Perkara, cerai talak 17 perkara, perwalian 1 perkara, itsbat nikah 1 perkara, dispensasi nikah 12 perkara, wali adhal 1 perkara, performa 2 perkara, lain-lain 9 perkara.[[20]](#footnote-21)

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis ungkapkan, maka gambaran umum mengenai implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang dilakukan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi bantuan hukum di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah dilaksanakan secara litigasi dan non litigasi dengan berbagai cara. Diantaranya masyarakat datang langsung ke kantor Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah, rujukan dari stakeholder serta melalui posbakum pengadilan agama.
2. Pelayanan bantuan hukum di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah secara litigasi telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pelayanan Non Litigasi tidak hanya dilakukan melalui kantor namun juga melalui Posbakum Pengadilan khususnya di Pengadilan Agama. Hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan.
3. Perkara yang ditangani Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa di posbakum pengadilan agama pada tahun 2018-2020 meliputi :

a. Pengadilan Agama Boyolali tahun 2018 jumlah total 99 perkara, dengan rincian: cerai gugat 41 Perkara, cerai talak 30 perkara, harta bersama 1 perkara, perwalian 1 perkara, itsbat nikah 1 perkara, dispensasi nikah 3 perkara, perubahan nama 15 perkara, kewarisan 1 perkara, hak asuh anak 5 perkara, lain-lain 1 perkara

1. Pengadilan Agama Sukoharjo tahun 2018 jumlah total 105 perkara dengan rincian: cerai gugat 12 Perkara, cerai talak 7 perkara, wali adhal 1 perkara, perubahan nama 1 perkara, verzet 1 perkara, hak asuh anak 5 perkara, lain-lain 78 perkara.
2. Pengadilan Agama Wonogiri tahun 2019 jumlah total 151 perkara perkara dengan rincian cerai gugat 19 Perkara, cerai talak 20 perkara, dispensasi nikah 4 perkara, perubahan nama 11 perkara, kewarisan 4 perkara, hak asuh anak 1 perkara, asal-usul anak 1 perkara lain-lain 90 perkara.
3. Pengadilan Agama Sukoharjo tahun 2019 jumlah total 254 perkara perkara dengan rincian cerai gugat 37 Perkara, cerai talak 27 perkara, izin poligami 0 perkara, penolakan 0 perkara, harta bersama 8 perkara, pengesahan anak 0 perkara, pengangkatan anak 1 perkara, perwalian 1 perkara, itsbat nikah 1 perkara, dispensasi nikah 10 perkara, wali adhal 0 perkara, perubahan nama 7 perkara, verzet 0 perkara, kewarisan 7 perkara, hibah 0 perkara, penetapan ahli waris 1 perkara, hak asuh anak 0 perkara, lain-lain 154 perkara.
4. Pengadilan Agama Purbalingga dari bulan januari – maret tahun 2019 jumlah total 345 perkara meliputi: cerai gugat 229 Perkara, cerai talak 77 perkara, izin poligami 0 perkara, penolakan 0 perkara, harta bersama 1 perkara, pengesahan anak 3 perkara, pengangkatan anak 1 perkara, perwalian 1 perkara, itsbat nikah 4 perkara, dispensasi nikah 13 perkara, wali adhal 4 perkara, perubahan nama 8 perkara, kewarisan 1 perkara, hibah 0 perkara, penetapan ahli waris 1 perkara, lain-lain 2 perkara.
5. Pengadilan Agama Boyolali per-Maret 2020 jumlah total 218 perkara dengan rincian cerai gugat 103 Perkara, cerai talak 39 perkara, izin poligami 1 perkara, pengangkatan anak 1 perkara, dispensasi nikah 55 perkara, perubahan nama 16 perkara, penetapan ahli waris 2 perkara, lain-lain 1 perkara.
6. Pengadilan Agama Klaten per-Maret 2020 jumlah total 179 perkara dengan rincian cerai gugat 108 Perkara, cerai talak 25 perkara, pengangkatan anak 2 perkara, perwalian 3 perkara, itsbat nikah 1 perkara, dispensasi nikah 20 perkara, wali adhal 1 perkara, kewarisan 1 perkara, penetapan ahli waris 3 perkara, lain-lain 15 perkara.
7. Pengadilan Agama Sukoharjo per-Maret 2020 jumlah total 184 perkara dengan rincian cerai gugat 40 Perkara, cerai talak 56 perkara, pengangkatan anak 4 perkara, perwalian 3 perkara, itsbat nikah 1 perkara, dispensasi nikah 27 perkara, perubahan nama 7 perkara, penetapan wali 2 perkara, penetapan ahli waris 6 perkara, lain-lain 38 perkara.
8. Pengadilan Agama Sragen per-Maret 2020 jumlah total perkara ada 90 perkara dengan rincian cerai gugat 47 Perkara, cerai talak 17 perkara, perwalian 1 perkara, itsbat nikah 1 perkara, dispensasi nikah 12 perkara, wali adhal 1 perkara, performa 2 perkara, lain-lain 9 perkara.

4. Jenis perkara yang ditangtani di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah cukup kompleks dan terus meningkat tiap tahunnya serta didominasi perkara cerai gugat. adapun dari sisi pelayanan tetap mengedepankan pelayanan untuk perempuan, anak dan difabel korban kekerasan sebagaimana visi misi yang diemban organisasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Febri Handayani, SHI., M.H, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2016).

Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Media Komputindo, 2000).

Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah, Peraturan-Peraturan Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Pandangan Islam dan Solusinya*, (Yogyakarta: Idea Press, 2012).

Undang-undang No.16 Tahun 2011Tentang Bantuan Hukum.

Wawancara Anis Thoifah, SH.

Wawancara Ahmad Anshori SH.

Wawancara Ahmad Jalal SH.

Wawancara Ahmad Zia Khakim, SH.

Wawancara Kholikul Aziz SH.

Wawancara Siti Zaenatul Mar’ah, SH.

1. Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah, Peraturan-Peraturan Bantuan Hukum, Undang-undang No.16 Tahun 2011. [↑](#footnote-ref-2)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Penyelenggaraan Bantuan [↑](#footnote-ref-3)
3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 [↑](#footnote-ref-4)
4. pasal 27 PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. [↑](#footnote-ref-5)
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013. [↑](#footnote-ref-6)
6. Febri Handayani, SHI., M.H, *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta : Kalimedia, 2016. Hlm. 257. [↑](#footnote-ref-7)
7. Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Media Komputindo, 2000, hlm 96. [↑](#footnote-ref-8)
8. Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016, cet-1, hlm 257-256. [↑](#footnote-ref-9)
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. [↑](#footnote-ref-10)
10. UU No. 16 Tahun 2011Tentang Bantuan Hukum. [↑](#footnote-ref-11)
11. Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Pandangan Islam dan Solusinya*, (Yogyakarta: Idea Press, 2012), hlm. 31. [↑](#footnote-ref-12)
12. Wawancara Anis Thoifah, SH. Petugas Posbakum Pengadilan Agama Boyolali. [↑](#footnote-ref-13)
13. Wawancara Ahmad Anshori SH. Petugas Posbakum Pengadilan Agama Sukoharjo. [↑](#footnote-ref-14)
14. Wawancara Siti Zaenatul Mar’ah, SH. Petugas Posbakum Pengadilan Agama Wonogiri. [↑](#footnote-ref-15)
15. Wawancara Ahmad Anshori SH. Petugas Posbakum Pengadilan Agama Sukoharjo. [↑](#footnote-ref-16)
16. Wawancara Ahmad Jalal SH. [↑](#footnote-ref-17)
17. Wawancara Anis Thoifah, SH. Petugas Posbakum Pengadilan Agama Boyolali. [↑](#footnote-ref-18)
18. Wawancara Ahmad Zia Khakim, SH. Petugas Posbakum Pengadilan Agama Klaten. [↑](#footnote-ref-19)
19. Wawancara Ahmad Anshori SH. Petugas Posbakum Pengadilan Agama Sukoharjo. [↑](#footnote-ref-20)
20. Wawancara Kholikul Aziz SH. Petugas Posbakum Pengadilan Agama Sragen. [↑](#footnote-ref-21)